

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyerapan anggaran di Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2022 masih menunjukkan adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Penyerapan anggaran setiap bulan dari Januari sampai dengan bulan November rata-rata sebesar 4% sampai dengan 8%, namun pada bulan Desember realisasi sebesar 24,13% dimana realisasi anggaran bulan November adalah sebesar 75,35% sedangkan di bulan Desember realisasi anggaran sebesar 99,48%. Dari data ini menunjukkan bahwa penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun di Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2022 masih terjadi.

Penumpukan penyerapan atau realisasi anggaran akhir tahun di Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2022 dilihat dari faktor-faktor penyebabnya adalah:

1. Faktor Perencanaan Anggaran, masalah perencanaan dalam penelitian ini terkait dengan data dukung yang sering mengalami keterlambatan karena adanya jadwal dari biro perencanaan yang mepet sedangkan prosesnya masih memerlukan telaah intern dari itjen sebagai catatan dalam pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian keuangan. Kendala-kendala ini biasanya masih bisa diatasi dengan pengunggahan data dukung di aplikasi Sakti, kemudian jika ada pemblokiran dari DJA maka pimpinan diberikan kesempatan pemenuhan data agar bisa dibuka dan digunakan. Kondisi ini tergantung dari masing-masing satker dalam rangka pemenuhan data dukung, jika data dukung dipenuhi dengan cepat dan benar maka pemblokiran anggaran tidak akan terjadi.
2. Faktor Pelaksanaan Anggaran, masalah dalam pelaksanaan anggaran ini terjadi karena belum konsistennya penanggungjawab kegiatan atau pelaksana kegiatan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya, tidak semua penanggungjawab kegiatan mengerti terkait mekanisme-mekanisme pembayaran yang sesuai dengan karakteristik kegiatan, adanya kekurangan berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan

yang mengakibatkan prosesnya pengajuan keuangan tertunda, adanya keterlambatan dalam proses penyeteroran berkas pertanggungjawaban keuangan khususnya pada saat proses GUP dan TUP, adanya aplikasi baru pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sehingga perlu penyesuaian dalam pemenuhan berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan.

Faktor pelaksanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap penumpukan anggaran diatas, kemudian kemudian faktor perencanaan anggaran juga mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran karena dengan adanya data dukung yang kurang lengkap kemudian adanya keterlambatan data dukung yang menyebabkan adanya pemblokiran anggaran, dari blokir anggaran akan meyebabkan proses buka blokir yang membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga dari hal tersebut berakibat pelaksanaan anggaran tertunda dan penyerapan anggaran juga akan mengalami keterlambatan dan menumpuk di akhir tahun,

3. Faktor pengadaan Barang dan Jasa, permasalahan pengadaan barang dan jasa biasanya terkait dengan pemenuhan berkas-berkas pertanggungjawaban kegiatan, pemenuhan berkas-berkas ini sebenarnya tergantung dari komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak penyedia, jika komunikasinya bagus maka pertanggungjawaban berkas-berkas tidak akan mengalami kendala dan hambatan. Selain itu jika adanya permasalahan keterlambatan berkas dan berkas tidak bisa masuk ke KPPN maka terdapat solusi alternative dimana proses pembayarannya menggunakan metode Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Faktor pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap terhadap penumpukan penyerapan anggaran akhir tahun, hal ini dikarenakan belum semua penyedia barang dan jasa faham terhadap kelengkapan berkas-berkas pertanggungjawaban sehingga dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan, dari keterlambatan itu berakibat adanya perubahan mekanisme pembayaran dari LS ke pihak ketiga berubah menjadi TUP

dimana pengajuan TUP tidak setiap satu bulan satu kali, sehingga kegiatan sudah selesai namun pembayaran atau realisasi bisa mundur satu atau dua bulan kedepan

4. Faktor Sumber Daya Manusia, masalah terkait Sumber Daya Manusia ini terjadi karena adanya perbedaan keahlian atau kompetensi masing-masing pengelola keuangan yang seringkali melakukan diskusi dahulu dalam menentukan mekanisme pembayaran, adanya pengelola keuangan yang kurang cekatan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memproses berkas-berkas keuangan yang berakibat tidak diterimanya berkas-berkas di Biro umum dan proses pengajuan SPM menunggu berkas selesai dan lengkap.

Faktor Sumber Daya Manusia juga berpengaruh karena kecepatan dan ketepatan dalam pemenuhan berkas pertanggungjawaban berpengaruh besar terhadap penumpukan diatas, selain itu dari faktor SDM khususnya penanggungjawab kegiatan harus mempunyai kompetensi dalam bidang keuangan dan anggaran karena hal ini akan berpengaruh pada proses pengajuan keuangan,

Dari uraian diatas, terkait dengan penelitian analisis faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran akhir tahun di Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2022 jika dirinci dari empat faktor yaitu Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya manusia berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran dengan masing-masing permasalahannya.

Selain dari empat faktor yang sudah penulis jabarkan diatas, penulis melihat adanya pengaruh lain yang menjadipemmasalahan saat melakukan penelitian, dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dimana pada tahun 2022 setelah DIPA disahkan ternyata ada surat mengenai pemblokiran mandiri atau AA, dari kebijakan kementerian keuangan ini akhirnya pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan lebih fokus pada pembahasan terkait kegiatan-kegiatan yang harus diblokir atau tidak, kemudian juga lebih menunggu apakah ada proses

blokir lagi kedepannya, hal ini tentunya sangat berpengaruh pada realisasi akhir tahun 2022, jika peneliti menyimpulkan maka adanya faktor lain yang menyebabkan penumpukan relaisasi akhir tahun pada Biro SDM aparatur dan Organisasi yaitu adanya kebijakan nasional atau kebijakan eksternal.

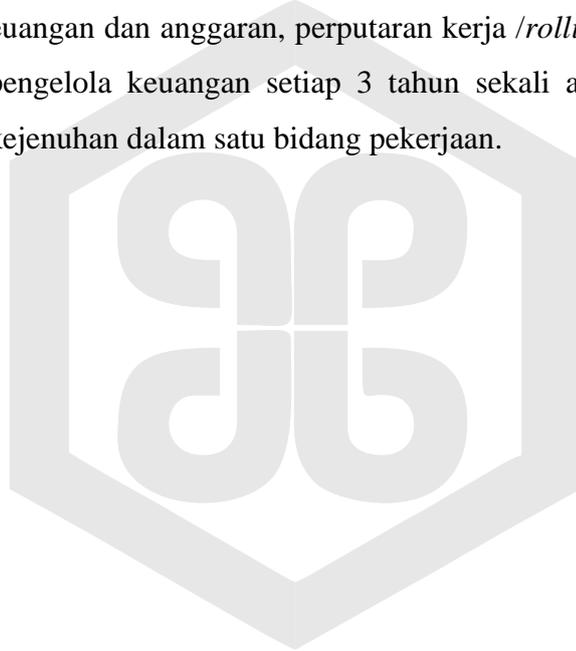
B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan terkait faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2022 dan kesimpulan yang sudah peneliti sampaikan diatas maka peneliti memberikan saran-saran agar kedepannya tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun atau mengurangi penumpukan penyerapan akhir tahun sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Anggaran,
Keterlibatan dari pimpinan secara langsung pada saat penyusunan anggaran dan pemenuhan data dukungnya, sebaiknya dibuat jadwal palang/rencana kegiatan masing-masing penanggungjawab kegiatan, dan rencana penarikan dana disesuaikan pada bulan pelaksanaan kegiatan,
2. Aspek Pelaksanaan Anggaran,
Konsistensi penanggungjawab atau pelaksana kegiatan dalam hal pencapaian target dan realisasi setiap bulannya, mengurangi intensitas revisi anggaran setiap tahun agar tidak mengurangi penilaian kinerja anggaran (IKPA), dan dibuatkan checklist berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan sebelum pengajuan pencairan dana, serta kesepakatan antara pengelola keuangan bagian dengan pengelola keuangan satker dalam hal pemilihan metode pembayaran.
3. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa,
Informasi daftar pengadaan barang jasa dan rencana pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan pejabat pengadaan sehingga memudahkan pelaksana kegiatan dengan pejabat pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan kontrak ataupun Surat Perjanjian Kerja

4. Aspek Sumber Daya manusia,

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai pengelola keuangan, anggaran dan pengadaan barang dan jasa diikutkan diklat-diklat teknis, regenerasi bagi pelaksana keuangan dan anggaran, perputaran kerja /*rolling system* pegawai khususnya pengelola keuangan setiap 3 tahun sekali agar pegawai tidak mengalami kejenuhan dalam satu bidang pekerjaan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sugiono. (2014). Cara Mudah Menyusun Sripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta
- Sahya Anggara. (2016). Administrasi Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia
- Abdul Halim. (2016). Manajemen Keuangan sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- M. Suparmoko.(2000). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE
- Haryanto, et al. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Politeknik STIA LAN. (2022). Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Jakarta

B. Artikel Jurnal

- Warta Anggaran edisi 43. 2022. Majalah keuangan publik.Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Mashudi Adi Nugroho. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN Akhir tahun (Studi Kasus KPPN Malang), Malang
- Prasetyo Adi Priatno. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar Tahun 2013.
- NinaSudarwati, et al.2017. Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Akhir Tahun (studi kasus pada balai penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado).Manado

Anfujatin. Tanpa Tahun. Analisis Faktor-Faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kabupaten Tuban.

Ahmad Rifai et al. Tanpa Tahun. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB)

Nur Fitriyani et al. 2013. Exploring The Factors That impact the Accumulation of budget absorption in the end of the fiscal Year.

Cut Malahyati, et al. Tanpa Tahun. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, dan pelaksanaan Anggran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan RKA-KL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penegasahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 158/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 116 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Permen-KP/2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA dan Pengesahan DIPA

Perturan Direktur Jenderal anggaran Nomor 7/AG/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

D. Dokumen-Dokumen Lainnya

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Paerikanan Tahun 2022

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan I,II, III dan IV Tahun 2022

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022

<http://www.ropeg.kkp.go.id/lapspip>

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/home>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

<https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**